

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kenaikan harga bawang merah yang cukup signifikan pada bulan April dan baru mengalami penurunan Pada akhir bulan Mei. Yang biasanya harga bawang merah di kisaran Rp. 45.000/kg menjadi Rp. 70.000/kg (harga tertinggi). Hal tersebut sempat dialami selama beberapa minggu dan sudah mengalami penurunan di awal bulan Juni.

Sampai Akhir bulan Juni, bisa dilaporkan stok bahan pokok dan bahan pangan aman serta dengan harga yang cenderung stabil menjelang dan setelah Hari Raya Idul Adha tahun 2024.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Barat pada Triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kecendrungan terjadi peningkatan inflasi menjelang Hari Raya Idul Adha di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
2. Kenaikan harga bawang merah yang cukup signifikan terjadi pada sejak bulan April dan Puncaknya di awal bulan Mei, dimana kenaikan harga tersebut cukup meresahkan masyarakat khususnya pedagang /warung makan yang membutuhkan bawang merah sebagai bahan masakan.
3. Keadaan topografi dan jenis tanah di Kabupaten Kutai Barat tidak terlalu baik untuk ditanami bawang merah. Sehingga tidak banyak petani bawang merah yang ada di Kabupaten Kutai Barat sehingga untuk memasoknya tetap didatangkan dari Pulau Jawa dan Kota Samarinda.
4. Sebagai daerah yang bukan merupakan sentra produksi, Kabupaten Kutai Barat sangat bergantung kepada pasokan dari luar daerah seperti Samarinda, untuk sejumlah komoditas utama seperti beras, gula, bawang merah, bawang putih, cabe dan daging ayam ras. Beberapa komoditi tersebut masih disuplay atau dipasok dari daerah lain
5. Akses jalan yang masih rusak dan parah di wilayah Kecamatan Bongan dan Perbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara, sangat mempengaruhi kelancaran distribusi, terjadinya kerusakan pada banyak titik menyebabkan pergerakan harga menjadi naik karena biaya angkut yang lebih besar. Kerusakan disebabkan banyaknya kendaraan pengangkut kelapa sawit dan CPO yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Kutai Barat. Permasalahan jalan ini sudah seringkali dilaporkan ke Pihak Provinsi maupun Pusat. Pemerintah Kabupaten tidak bisa menganggarkan perbaikan karena status jalan Negara.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Barat pada Triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Bagian Perekonomian Melaksanakan Pemantauan Ketersediaan/stok dan harga bahan pokok dan bahan pangan di 16 Kecamatan menjelang Hari Raya Idul Adha. Kegiatan dilaksanakan mulai tanggal 14 Mei sampai dengan 7 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa menjelang Hari Raya Idul Adha stok bahan pokok dan bahan pangan aman dan dengan harga yang cenderung stabil.

Dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan Kegiatan Gerakan Pangan Murah yang bekerjasama dengan Bulog Samarinda di Kecamatan Melak dan Kantor Ketahanan Pangan Kubar pada tanggal 14 sd 15 Juni 2024 dengan komoditi yang dijual antara lain : Beras SPHP 9 ton, Beras Premium Kita 3 Ton, Minyak Goreng 1.500 liter, Gula pasir 1.500 ton dan beberapa komoditi pangan seperti bawang merah, telur dll

3. Pengawasan LPG 3 kg dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian di 16 Kecamatan dimulai Bulan Mei sd Juni 2024
4. Pengawasan distribusi solar bersubsidi dilaksanakan di 16 Kecamatan wilayah Kabupaten Kutai Barat yang terdapat APMS/SPBU di bulan Mei sd Juni 2024
5. Telah dilaksanakan Penandatanganan Kerjasama Antar Daerah (KAD) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan tentang Kerjasama Antar Daerah dalam rangka Pengendalian Inflasi pada tanggal 15 Mei 2024 bertempat di kantor Bupati Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Barat pada Triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perlu intents dilaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah tidak hanya menjelang Hari Besar Keagamaan namun saat ada beberapa komoditi pangan yang mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan
2. Perlu adanya sosialisasi dan rapat koordinasi dengan OPD teknis terkait dalam hal penyusunan laporan triwulan TPID Kabupaten Kutai Barat.
3. Perlu adanya koordinasi yang lebih intens dengan pihak kecamatan terkait dalam hal pemantauan stok dan harga barang menjelang Hari Besar Keagamaan

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Barat pada Triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perlu sering dilaksanakan Gerakan Pangan Murah khususnya di Kecamatan terjauh tidak hanya menjelang Hari Besar Keagamaan namun rutin dilaksanakan tiap bulan
2. Perlunya ditingkatkan Kerjasama Antar Daerah khususnya dengan Daerah penghasil komoditi
3. Koordinasi dengan stake holder seperti Pelaku Usaha/ Masyarakat, Bulog, Pertamina maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sangat diperlukan sehingga ketersediaan/stok tetap terjaga dan harga barang di Kabupaten Kutai Barat tetap stabil.